Kepala Daerah: SILPA DBH-CHT 2021 Dampak Pandemi

Senin, 13 Juni 2022

Bupati Pasuruan menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu sumber SILPA tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara maksimal.

Pandemi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program DBHCHT karena adanya pembatasan kegiatan hingga September 2021, sehingga berdampak pada realisasi kegiatan. SILPA DBHCHT kemudian dialokasikan kembali pada tahun 2022 dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan.

Bupati menyatakan bahwa alokasi yang besar, regulasi ketat, dan verifikasi detail dalam program DBHCHT membuat Pemda kesulitan menjalankan program sesuai prioritas kebutuhan daerah. Oleh karena itu, Pemda Pasuruan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meminta pelonggaran kebijakan dalam pengelolaan DBHCHT.

Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Kabupaten Pasuruan atas apresiasi yang diberikan terkait capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Rapat Paripurna Kedua pada 13 Juni 2022 ini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota DPRD, Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD, Pimpinan BUMD, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.